

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam ini penelitian memaparkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Kebijakan. Dari penelitian terdahulu ini, tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian yang diangkat. Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penelitian untuk dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal terkait penelitian yang dilakukan:

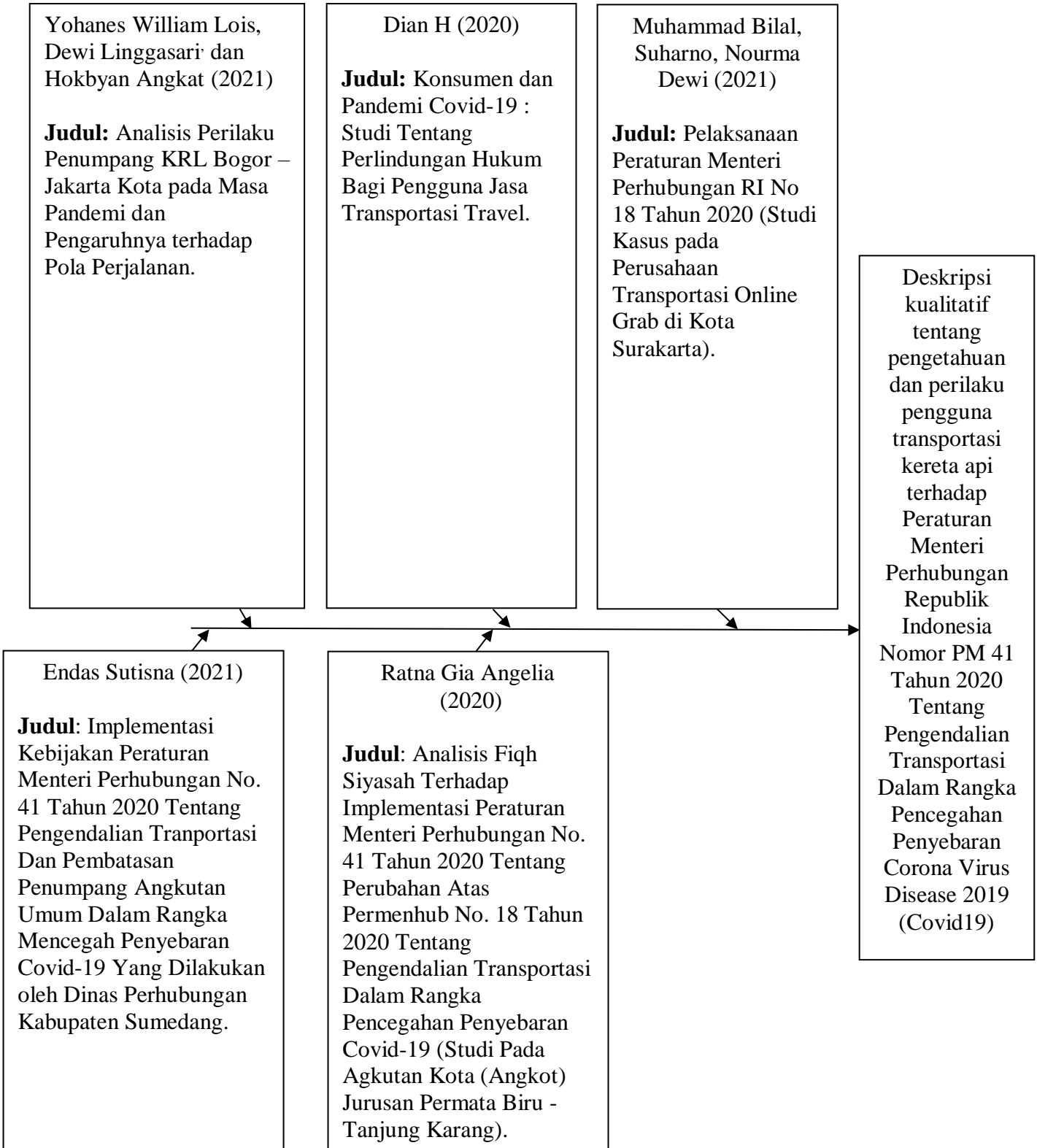
Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Nama, dan Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Perilaku Penumpang KRL Bogor – Jakarta Kota pada Masa Pandemi dan Pengaruhnya terhadap Pola Perjalanan. Yohanes William Lois ¹ , Dewi Linggasari ² , dan Hokbyan Angkat ³ . Jurnal Mitra Teknik Sipil Vol. 4, No. 1, (2021).	Dalam mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah menggunakan kuesioner, lalu diolah dengan metode analisis normatif dan deskriptif.	Dari hasil analisis, didapatkan baik penumpang maupun petugas sudah cukup awas dan baik dalam menerapkan kebijakan yang ada dan penumpang mengungkapkan dengan adanya kebijakan ini mempengaruhi pola perjalanannya
2.	Konsumen dan Pandemi Covid-19 Studi Tentang Perlindungan Hukum	Dalam mengumpulkan data menggunakan metode analisis data menggunakan analisis	Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan transportasi travel di masa pandemi covid-19

	<p>Bagi Pengguna Jasa Transportasi Travel. Muhammad Naufal Nada Silma. Jurnal Hukum (2020).</p>	<p>kualitatif deskriptif</p>	<p>masih sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020.</p>
<p>3.</p>	<p>Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan RI No 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Covid-19 (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Online Grab di Kota Surakarta). Muhammad Bilal¹, Suharno², Nourma Dewi³, eJournal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 1, Tahun (2021).</p>	<p>Dalam mengumpulkan data menggunakan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moda transportasi online Grab di Kota Surakarta telah melakukan berbagai perubahan dalam standar operasional prosedur dalam pelaksanaan bisnis transportasi online di masa pandemi Covid19 dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Surakarta kendati masih terdapat kesadaran yang rendah bagi mitra pengemudinya.</p>
<p>4.</p>	<p>Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dan Pembatasan Penumpang Angkutan Umum Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Covid-19</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik penentuan informan penelitian , yaitu purposive sampling.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan peraturan menteri perhubungan no 41 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dan pembatasan penumpang angkutan umum dalam rangka mencegah penyebaran covid 19</p>

	<p>Yang Dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Endas Sutisna, Skripsi :Ilmu Administrasi Negara 2021.</p>		<p>yang dilakukan oleh dinas perhubungan kabupaten sumedang belum terlaksana secara maksimal.</p>
5.	<p>Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Agkutan Kota (Angkot) Jurusan Permata Biru - Tanjung Karang). Ratna Gia Angelia. Skripsi Hukum Tata Negara 2021.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah deskriptif kualitatif.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwasannya masih banyak sekali pengguna angkot yang tidak melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 serta tidak adanya teguran dari supir angkot untuk tetap menerapkan protokol kesehan sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan bagi para pengguna angkot. kurangnya kesadaran pada diri individu untuk tetap menerapkan peraturan sesuai Peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan tidak hanya sebagai peraturan saja tetapi peraturan yang telah dibuat untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan.</p>

Gambar 2.1
Diagram FishBone



Terdapat pembaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut yakni penulis menyajikan penelitian tentang aturan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No.41 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terlokuskan pada PT Kereta Commuter Indonesia, di Stasiun Tanah Abang.

2.2 Kajian Teori

1.2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Salah satu definisi yang diberikan Sulaiman terkait kebijakan publik adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus, dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan (Sulaiman, 1998:24). Istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda, kebijakan atau kebijaksanaan publik mempunyai arti yang beraneka ragam. Chief. J.O. Udoji (1981) mendefinisikan juga bahwasannya *public policy* (kebijakan publik) sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah atau sekelompok tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Oktaviani.J 2018).

Selain itu, terdapat pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang lain. Menurut Keban (2004:55) bahwa “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: **a).** Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. **b).** Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau

rekomendasi. **c).** Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan **d).** Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Keban, 2008:57 juga menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan (Oktaviani.J 2018).

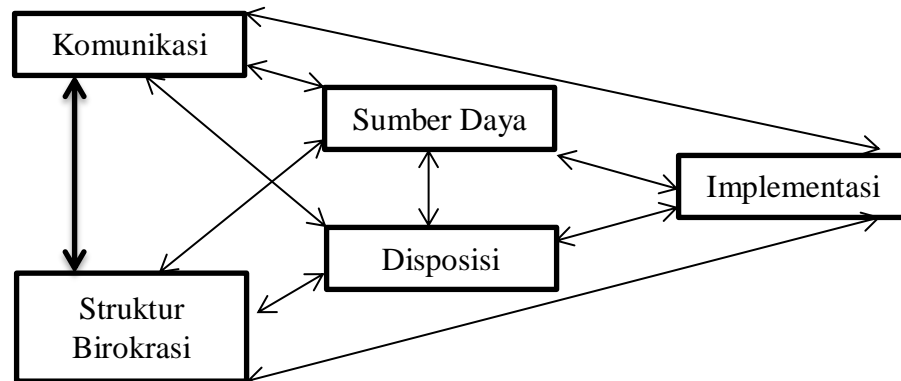
Secara terminologi pengertian implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan sebuah kebijakan, guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Oktaviani.J 2018).

1.2.2 Model George Charles Edwards III

Model pelaksanaan yang dikemukakan oleh George C. Edwards di dalam buku Budi Winarno (2007:174-202), implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun, walaupun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh

pelaksana kebijakan tersebut. Dalam pendekatan model implementasi ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

Gambar 2.2
Implementasi Kebijakan Model Edwards III



Sumber : George C. Edwards III: *Implementing Public Policy*, 1980.

Keterangan: keempat variabel tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keseluruhan variabel saling berhubungan dan saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi.

- a. **Komunikasi**, secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Seperti keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana agar mereka memahaminya. Terdapat 3 indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi yaitu : **Transmisi**, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali

yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miscommunication). **Kejelasan**, komunikasi yang diterima oleh pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan, akan tetapi ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. **Konsistensi**, Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Jika perintah diberikan sering berubah-ubah, maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

- b. **Sumberdaya**, perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi tersebut cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumber-sumber yang menunjang untuk pelaksanaan implementasi yaitu: **Staf**, Banyaknya jumlah staf tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan karena staf tidak mencukupi ataupun tidak memadai bidang yang mereka laksanakan. Tetapi yang harus diperlukan ialah staf yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan kebijakan ataupun tugas yang di tanggungnya. **Informasi**, Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dan yang kedua, tentang ketaatan personil-personil terhadap peraturan pemerintah. **Wewenang**, Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalah dalam melihat efektifitas kewenangan. **Fasilitas**, Fasilitas merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Mempunyai seorang staf yang memadai, memahami apa yang harus dilakukan, dan mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya. tetapi tanpa bangunan kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan dan tanpa

perbekalan, kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

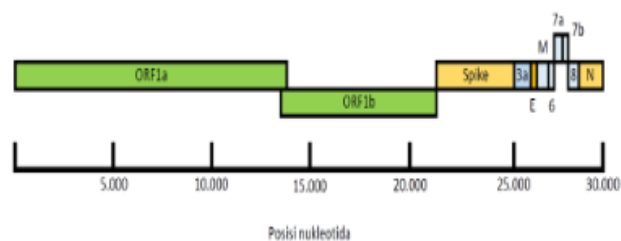
- c. **Disposisi**, jika pelaksana (disposisi) ini bersikap baik terhadap suatu kebijakan tersebut, dan danya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan demikian pula sebaliknya. Ada variable yang harus di cermati yaitu : **Pangkatan birokrat**, Hal ini menjadi persoalan yang menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang bisa bertanggung jawab pada kebijakan yang telah ditetapkan. **Insentif**, Mengatasi masalah ini dengan cara memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya dan kepentingan tertentu untuk mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan baik.
- d. **Struktur birokrasi**, birokrasi merupakan salah satu badan yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Untuk membentuk organisasi secara sadar ataupun tidak sadar untuk memecahkan masalah-masalah di dalam implementasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Oleh karena itu, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan sebagai berikut: **Standard Operating Procedures (SOP)**, standard operating procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107). **Fragmentasi**, merupakan pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional yang tersebar luas. Fragmentasi perlu memerhatikan sifat dan kebijakan yang ingin

diimplementasikan, dan penyebaran tanggung jawab kepada seluruh pelaksana kebijakan.

1.2.3 Coronavirus Disease (Covid-19)

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).¹⁴ Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus.¹⁵ Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama SARS-CoV-2.

Gambar 2.3
Struktur Genom Virus Covid-19



Sumber : Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Keterangan: struktur genom virus ini memiliki pola seperti coronavirus pada umumnya (Gambar 2.3). Sekuens SARS-CoV-2 memiliki kemiripan dengan coronavirus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara.

Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir perantara. Strain coronavirus pada trenggiling adalah yang mirip genomnya dengan coronavirus kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). Jadi secara esensi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia) (Susilo et al. 2020).

Pada akhir tahun 2019 tepatnya di bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah fenomena yang membuat banyak masyarakat resah gelisah yaitu dikenal dengan virus corona (covid-19). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan (Yuliana, 2020). Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China (Dong et al., 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus (Susilo et al. 2020) .

Munculnya 2019-nCoV telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, dilaporkan total kasus konfirmasi 414.179 dengan 18.440 kematian (CFR 4,4%) dimana kasus dilaporkan di 192 negara/wilayah. Diantara kasus tersebut, sudah ada beberapa petugas kesehatan yang dilaporkan terinfeksi (Kemenkes RI, 2020).

Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan

akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Putri 2020).

Wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Virus ini sempat membuat semua kegiatan sehari-hari manusia terhambat. Karantina saja mungkin tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, dan dampak global dari infeksi virus ini adalah salah satu yang semakin memprihatinkan. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemic ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan Social Distancing untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari pertemuan masal. Namun, pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus terus meningkat. Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani kasus pandemic covid-19 ini juga belum memadai sedangkan kasus terus melonjak naik (Putri 2020).

1.2.4 Transportasi Darat

Secara etimologi transportasi berasal dari kata transportation, dalam bahasa Inggris memiliki arti dimana angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tanpa menggunakan mesin. Bisa juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan).

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu menentukan keberhasilan pembangunan. Perekonomian diartikan sebagai kondisi yang meliputi berbagai kegiatan yang dikelompokkan dalam kegiatan produksi, transaksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi perekonomian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian yang transisi. Perkembangan perekonomian menurut tahapannya mencerminkan kondisitransportasinya. Dalam tahap perekonomian modern, kondisi transportasinya mengalami sangat maju. Kondisi perkembangan transportasi dan pembangunan melihat arah yang sama atau hubungan yang sangat positif (Oliver 2019).

Moda transportasi darat terdiri dari seluruh bentuk alat transportasi yang beroperasi di darat. Moda transportasi darat sering dianggap identik dengan moda transportasi jalan raya (Warpani, 1990). Moda transportasi darat terdiri dari berbagai varian jenis alat transportasi dengan ciri khusus. Menurut Miro (2012), Transportasi darat dapat di klasifikasikan menjadi:

- a. Geografis Fisik, terdiri dari moda transportasi jalan rel, moda transportasi perairan daratan, moda transportasi khusus dari pipa dan kabel serta moda transportasi jalan raya (Giulietti and Assumpção 2019).
- b. Geografis Administratif, terbagi atas transportasi dalam kota, transportasi desa, transportasi antar-kota dalam provinsi (AKDP), transportasi antar kota antara provinsi (AKAP) dan transportasi lintas batas antar negara (internasional) (Giulietti and Assumpção 2019).

1.2.5 Undang-Undang Perkeretaapian

Dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, mendefinisikan bahwa kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana kendaraan lainnya, yang akan ataupun yang sedang bergerak di atas rel yang berhubungan dengan perjalanan kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan

kendaraan lainnya). Rangkaian kereta tersebut berukuran relatif luas. Beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antarnegara sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Oleh sebab itu, sifatnya sebagai angkutan massal sangat efektif.

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang mampu memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan ekonomi dan masyarakat. Banyak kota-kota tumbuh dan berkembang setelah adanya jaringan kereta api, jenis moda ini juga merangsang pertumbuhan angkutan jalan raya (Shakespeare 2014).

2.3 Kerangka Berpikir

Pembahasan akan dibahas mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan bahwa masyarakat dirasa perlu untuk merealisasikan perilaku jaga jarak (*physical distancing*) pada masa pandemi, khususnya dalam perjalanan kereta commuter line. Dengan melihat berbagai permasalahan yang terjadi mengenai perilaku jaga jarak (*physical distancing*) bahwa masih maraknya pengguna moda transportasi kereta commuter line dalam perjalanan didaerah aglomerasi (jabodetabek) yang tidak merealisasikan perilaku tersebut terutama dalam perjalanan ke Stasiun Tanah Abang, hal tersebut menimbulkan isu dan pertanyaan terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, apakah sudah berjalan dengan maksimal atau tidak.

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir

